



Ahok Melawan

Pengajuan Hak Angket Oleh DPRD DKI Bisa Menjadi Jalan Menuju Pemakzulan Ahok

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak gentar dengan langkah DPRD mengajukan hak angket terkait RAPBD 2015. Ia tak peduli seandainya dewan meneruskan manuver untuk memakzulkan dirinya.

“Kalau saya terjungkal karena hal ini, tidak apa-apa. Saya puas. Saya disumpah menjadi gubernur untuk mempertahankan uang rakyat. Jadi dalam hidup, saya tidak menghancurkan nurani saya,” tegas Ahok di Balai Kota DKI, kemarin.

Ia dengan senang hati dengan keputusan DPRD untuk menyelidiki kebijakan yang ia buat sehingga semuanya akan menjadi terang-benderang. Ia juga tetap akan melawan dengan melaporkan dugaan penyimpangan APBD ke KPK dan Kejaksaan Agung. “Saya senang ada angket resmi. Saya bilang ini hadiah 100 hari jadi gubernur,” ujar Ahok yang menjadi gubernur definitif pada 19 November 2014.

Pengajuan hak angket ditekankan 102 dari total 106 anggota dewan dan disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, kemarin. Hak angket ialah hak dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.

Dalam penyampaian pandangan, seluruh fraksi mendukung pengajuan hak angket atas tindakan Pemprov DKI Jakarta mengirimkan RAPBD bukan hasil pembahasan dan persetujuan dewan ke Kementagri.

Tindakan itu dianggap menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Ketua Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak menegaskan pihaknya mendukung hak angket karena ingin memberitahukannya kepada warga Jakarta bahwa tidak selamanya Gubernur benar. “DPRD ingin menunjukkan kebenaran terkait tindakan Ahok, yakni pemalsuan dokumen RAPBD 2015.”

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra M Taufik juga menyatakan tindakan Ahok dengan mengirimkan draf RAPBD 2015 bukan hasil pengesahan paripurna pada 27 Januari merupakan pelanggaran hukum.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-PAN, Ahmad Nawawi, mengemukakan, selain dugaan pelanggaran itu, sikap Ahok yang selalu menuduh anggota dewan menipiskan program tidak jelas serta bermain dengan oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak etis. “Kita investigasi ke SKPD, kita buktikan kita tidak bermain.”

Pemakzulan

Ketua DPRD DKI Prasetyo menandaskan, hak angket tak bisa ditawarkan lagi. Langkah itu pun bukan tidak mungkin membuka jalan pemakzulan Ahok jika nantinya ditemukan adanya tindak pidana.

Ahok mengakui RAPBD yang diserahkan ke Kementagri bukan hasil pengesahan di paripurna karena pihaknya tidak diberi draf hasil pembahasan itu. “Rupanya mereka membuat sendiri versi mereka dengan menambahkan anggaran untuk macam-macam lalu disodorkan ke saya untuk ditandatangani dan dikirim ke

Kementagri. Saya tolak. Yang saya kirim, ya RAPBD versi kami, tetapi sudah pernah dibahas dan ditandatangani.”

Ia kembali mengungkapkan, dalam draf RAPBD versi DPRD itu tiba-tiba tercantum ‘dana siluman’ Rp12,1 triliun. Modus serupa juga terjadi pada RAPBD 2014 ketika belum memakai sistem *e-budgeting*, salah satunya muncul anggaran *uninterruptible power supply* untuk sekolah sampai Rp6,2 miliar per unit. “Kita kecolongan waktu itu.”

Pengamat politik dari UI, Arbi Sanit, mengharapkan Mendagri Tjahjo Kumolo segera turun tangan untuk ikut menyelesaikan perseteruan Ahok-DPRD yang kian memanas itu. “Situasi semakin gawat dan membuat kedua lembaga pemerintahan daerah ini tidak produktif.” (Ssr/Ars/X-9)



Dugaan Mark-up Anggaran Pengadaan UPS di DKI Jakarta 2014

Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat

**Total:
Rp139,97
miliar**

Pemenang Lelang	Sekolah Penerima	Nilai (Rp miliar)
1. CV Bintang Mulia Wisesa	SMAN 27	5,83
2. CV Sinar Bununan	SMAN 25	5,81
3. CV Widya Karya	SMAN 24	5,82
4. PT Viento Lavende	SMAN 20	5,83
5. PT Frislianmar Masyur Mandiri	SMAN 10	5,83
6. Mitra Jaya Perkasa Abadi	SMAN 7	5,83
7. CV Wisanggeni	SMAN 5	5,82
8. PT Aurel Duta Sarana	SMAN 4	5,83
9. CV Parameswara	SMAN 1	5,83
10. CV Air Putih	SMKN 44	5,83
11. PT Barkanatas Dharma	SMKN 16	5,83
12. PT Dearma Pindo	SMKN 14	5,83
13. CV Permata Padi Purnama	SMKN 3	5,83
14. PT Hamparan Anugerah Sentosa	SMKN 39	5,83
15. CV Padang	SMKN 1	5,83
16. PT Manggala Apulindo	SMKN 34	5,83
17. PT Karunia Lautan Semesta Alam	SMKN 31	5,83
18. CV Tunjang Langit	SMKN 27	5,83
19. PT Putri Tonggi Mandiri	SMKN 21	5,83
20. PT Putri Tonggi Mandiri	SMKN 19	5,83
21. CV Anugerah Indah Mahakarya	SMAN 77	5,83
22. PT Ladita Berdua Karya	SMAN 68	5,83
23. PT Astrasea Pasirindo	SMAN 35	5,83
24. PT Berlian Kencana Sejahtera	SMAN 30	5,83

Dinas Pendidikan Tinggi Jakarta Barat

**Total:
Rp145,76
miliar**

1. PT Vito Mandiri	SMK 45	5,82
2. Wiyata Agri Satwa	SMKN 42	5,83
3. PT Dinamika Airufindo Persada	SMKN 35	5,83
4. PT Debitindo	SMKN 17	5,83
5. PT Hamparan Anugerah Sentosa	SMKN 13	5,83
6. Lumban Ambar Berbakti	SMKN 11	5,79
7. CV Air Putih	SMKN 9	5,83
8. Bentina Agung	SMAN 112	5,83
9. CV Padang Pengadaan	SMAN 101	5,83
10. PT Multi Langgeng	SMAN 96	5,83
11. CV Artha Prima Indah	SMAN 94	5,83
12. PT Tinada Kuta Dairi	SMAN 85	5,83
13. PT Tavia Belva	SMAN 84	5,83
14. PT Greace Solusindo	SMAN 78	5,82
15. PT Astrasea Pasirindo	SMAN 65	5,83
16. PT Elisa Mitra Inovatif	SMAN 57	5,83
17. CV Wisanggeni	SMAN 56	5,82
18. CV Tunjang Langit	SMAN 33	5,83
19. PT Paramitra Multi Prakasa	SMAN 23	5,83
20. CV Parameswara Pengadaan	SMAN 19	5,83
21. PT Aurel Duta Sarana	SMAN 17	5,83
22. CV Anugrah Mandiri Jaya	SMAN 16	5,83
23. PT Barkanatas Dharma	SMAN 2	5,83
24. Anugrah Cipta Karya	SMKN 60	5,83
25. CV Bukit Terpadu Utama	SMKN 53	5,83

Sumber: Pemprov DKI Jakarta/L-1